

# ANALISIS IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERBASIS ELEKTRONIK DI DESA MULYASARI KECAMATAN JATINAGARA KABUPATEN CIAMIS

Gerda Cendana<sup>1</sup>, Wiati Rahayu<sup>2</sup>, Yana Suryana<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Kabupaten Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: cendana.g45@gmail.com

## ABSTRAK

*Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia dewasa ini, teknologi telah membuat adanya kemudahan akses informasi terhadap segala kebutuhan manusia. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna menjadi jembatan dalam proses interaksi tersebut. Implementasi dan optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) merupakan langkah wajib dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan menuju konsep good governance (pemerintahan yang baik) bagi pemerintahan desa. Tak terkecuali bagi Pemerintah Desa Mulyasari di Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) merupakan suatu bentuk terobosan dalam inovasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai upaya adaptasi yang dilakukan pemerintah desa dalam menjaga perannya dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Keberadaan SID sangat penting dalam menunjang dan menyediakan arus informasi yang kredibel dan akuntabel. Pemerintahan yang berbasis digital menjadi suatu hal yang sangat penting di era modernisasi saat ini, termasuk di tingkat pemerintah desa di berbagai daerah, dengan adanya Sistem Informasi Desa, menjadi salah satu wadah yang penting bagi aktifnya pemerintah desa dalam menjalankan program-program yang ada, namun tidak semua desa memiliki Sistem Informasi Desa yang memadai termasuk desa Mulyasari yang terletak di dusun Cibubuhan Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara, Ciamis.*

**Kata Kunci:** Pemerintahan Desa, Sistem Informasi, Good Governance

## ABSTRACT

*With the rapid development of today's world, technology has made easy access to information for all human needs. For this reason, the use of information technology is an important thing to do in order to become a bridge in the interaction process. Implementation and optimization of the Village Information System (SID) is a mandatory step in supporting the administration of government towards the concept of good governance for village government. No exception for the Mulyasari Village Government in Jatinagara District, Ciamis Regency. According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, village government itself is the administration of government affairs by the village government and the Village Consultative Body in regulating and managing the interests of the local community. The implementation of the Village Information System (SID) is a form of breakthrough in the innovation of village governance as an adaptation effort made by the village government in maintaining its role in the social life of the village community. The existence of SID is very important in supporting and providing a credible and accountable flow of information. Digital-based governance has become a very important thing in the current era of modernization, including at the village government level in various regions, with the Village*

*Information System, being one of the important forums for the village government to be active in carrying out existing programs, but Not all villages have an adequate Village Information System, including the village of Mulyasari which is located in the Cibubuhan hamlet, Mulyasari Village, Jatinagara District, Ciamis.*

**Keywords:** *Village Government, Information Systems, Good Governance*

## **PENDAHULUAN**

Di era seperti sekarang, dimana setiap orang sudah terkoneksi satu sama lain melalui apa yang kita sebut sebagai Internet sekaligus membuat setiap individu menjadi bagian dari satu entitas masyarakat global. Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia dewasa ini, teknologi telah membuat adanya kemudahan akses informasi terhadap segala kebutuhan manusia. Kemudahan terhadap akses informasi ini juga membuat adanya proses interaksi yang lebih masif antara pemerintah dengan masyarakatnya. Maka setiap lembaga pemerintah secara tidak langsung dituntut untuk dapat beradaptasi dengan keadaan tersebut, baik itu lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga lembaga pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suprihatini, 2018).

Dalam hal ini pemerintah desa secara hierarki merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yang juga menuntut adanya interaksi langsung yang lebih akuntabel dan responsif. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan guna menjadi jembatan dalam proses

interaksi tersebut. Implementasi dan optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) merupakan langkah wajib dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan menuju konsep *good governance* (pemerintahan yang baik) bagi pemerintahan desa. Tak terkecuali bagi Pemerintah Desa Mulyasari di Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.

Namun, dalam tahap menuju implementasi SID itu sendiri tidak lepas dari kendala yang dihadapi, diantaranya sarana prasarana yang belum memadai dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Padahal, implementasi SID ini menjadi urgensi tersendiri dalam upaya pemerintah desa menjawab tantangan perubahan, di sisi lain adanya optimalisasi SID juga dapat menjadi pemicu meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih signifikan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemerintahan Desa**

Yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah segala sesuatu yang berupa penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang juga diikuti oleh badan permusyawaratan desa dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa, dan apabila didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang sudah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Selain itu, pemerintah desa atau yang akrab disebut kepala desa dan sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa harus memperhatikan batas-batas kewenangannya. Alasannya, hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah desa sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak menjadi tarik ulur atas kewenangan pemerintahan pusat dan

pemerintahan daerah (desa).

### **Sistem Informasi Desa (SID)**

Sistem Informasi Desa (SID) adalah bagian-bagian dari berbagai macam perangkat teknologi informasi serta menggunakan aplikasi perangkat lunak yang pengoperasiannya dilakukan oleh perangkat desa. Sistem ini sudah dibangun sejak 2009 yang bertujuan untuk mendukung percepatan kinerja dan menopang kualitas juga sebagai salah satu bentuk pelayanan public oleh para perangkat desa. Masyarakat desa setempat kelak dapat mengakses data dan informasi yang disediakan bagi konsumsi publik melalui berbagai perangkat teknologi yang ada untuk mendapatkan informasi tersebut, baik di wilayah desa mereka sendiri ataupun informasi mengenai desa lain. Pemanfaatan sistem ini diharapkan dapat memperkuat dasar dalam perencanaan pembangunan desa dan pengambilan keputusan. Strategi ini memanfaatkan SID sebagai bahan acuan untuk membuat setiap desa siap menjadi desa yang terbuka dan akuntabel. Sistem informasi desa ini dibangun dengan basis komputer dan web, sehingga informasi yang ada nantinya dapat diakses oleh setiap warga. Lisensi SID ini dikembangkan dengan menggunakan platform sistem operasi berupa terbuka dan bebas atau disebut dengan open and free source, yang artinya dapat digunakan, disalin, ataupun didistribusikan, dipelajari, modifikasi maupun ditingkatkan kinerjanya oleh siapapun dan dimanapun yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sistem informasi desa yang berbasis web (*web based*) yang sebenarnya sudah dikembangkan sejak 2005, namun untuk pengaplikasiannya diterapkan tahun 2009 dengan tujuan membantu kinerja desa.

Sistem informasi desa ini awalnya disebut dengan sebutan SIDESA, namun seiring berjalannya waktu berubah menjadi Sistem Informasi Desa atau SID seperti saat ini memiliki dua pengertian, yaitu pengertian secara sempit maupun luas. Dalam arti sempit, SID memiliki maksud sebagai sebuah program yang membantu pemerintah desa dalam kegiatan mendokumentasi data-data milik desa yang berguna untuk memudahkan proses pencarian. Sedangkan dalam

artian luas, SID diartikan sebagai sistem dari mekanisme, prosedur, hingga pemanfaatan yang memiliki tujuan mengelola sumber daya yang ada. Rangoaini Jahja (dalam Nasir, 2013).

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan rangkaian dari beragam perangkat teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat desa. Sistem yang dibangun sejak tahun 2009 ini digunakan untuk mendukung percepatan kerja kualitas dan pelayanan publik oleh perangkat desa kepada masyarakat desa setempat. Masyarakat desa dapat pula mengakses data dan informasi publik melalui beragam perangkat teknologi informasi, baik di wilayah desa setempat maupun di luar wilayah desa. Pemanfaatan sistem ini akan memperkuat dasar-dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam proses pembangunan desa. Strategi pengembangan dan pemanfaatan SID ini menjadikan desa siap menjadi desa yang terbuka dan akuntabel. SID dibangun dengan berbasis computer dan *web*, sehingga informasi-informasi dapat diakses oleh setiap warga. Sedangkan lisensi SID dikembangkan dengan menggunakan *platform* sistem operasi terbuka-bebas (*free and open source*) yang berarti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, dipelajari, dimodifikasi maupun ditingkatkan kerjanya oleh siapapun dan dimanapun sesuai dengan kebutuhan lapangan. Sistem ini merupakan sistem yang berbasis *web* (*web based*) dan telah dikembangkan sejak 2005. SID mulai diaplikasikan untuk membantu kinerja desa pada tahun 2009.

Sistem informasi desa ini hanya merupakan sistem pendukung, karena itulah SID memiliki keterbatasan. Efektif atau tidaknya sistem informasi desa ditentukan oleh pihak yang memiliki tanggungjawab akan penanggulangan bencana di tingkat desa ataupun yang tingkatnya lebih tinggi. Disisi lain, sistem informasi desa hanya akan bermanfaat optimal apabila dijalankan menjadi sebuah program resmi milik pemerintah desa yang tentunya didukung warga beserta para pemangku kebijakan lainnya. Tanpa kedua hal itu, SID tidak akan bisa berjalan sesuai dengan fungsi yang ditentukan. Ada tiga aspek yang menentukan penerimaan teknologi saat ini, yaitu perangkat

teknologi, perangkat lunak, dan pengorganisasian, ketiga hal ini dikaitkan dengan keadaan masyarakat dan lingkungan.

a. Perangkat Teknologi

SID sebagai teknologi informasi yang berkaitan dengan sistem komputer, hanya dapat dioperasikan di daerah yang memiliki ketersediaan listrik dan elemen pendukung dari sistem itu sendiri, termasuk yang dikenal sebagai perangkat keras atau hardware.

b. Perangkat lunak (*software*)

Yang disebut dengan perangkat lunak (*software*) adalah penggunaan aplikasi yang merujuk pada kapasitas dan seluruh proses yang terlibat dalam penggunaan teknologi.

c. Pengorganisasian (*orgware*)

Jika SID dirasakan oleh masyarakat luas, maka SID membutuhkan aspek lain untuk mendukung implementasinya, *orgware* yang diharapkan menjadi peraturan tingkat kabupaten/kabupaten/nasional yang mengatur penggunaan data dan informasi melalui SID. Aspek ini menunjukkan pentingnya peran serta masyarakat dalam menentukan keberhasilan suatu penggunaan teknologi.

### **Konsep Good Governance (Pemerintahan yang Baik)**

Sesungguhnya, *governance* merupakan pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. *Governance* dikatakan “good” bila sumberdaya dan problematika publik dikelola secara efektif dan efisien yang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat (UNDP, 1997). Pengelolaan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat menuntut iklim demokrasi dalam pemerintah dalam rangka pengelolaan sumber daya. Pengelolaan masalah-masalah public yang didasarkan pada keterlibatan masyarakat (partisipatori), akuntabilitas, dan transparansi.

Thomas (Dalam Tomo 1993) Good governance merupakan tuntutan imperative yang dijalankan, utamanya dengan terus berjalannya kompetisi ekonomi global yang semakin hari semakin ketat. Apabila good governance tidak dijadikan acuan

sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan, maka sebuah negara akan tetap tertinggal yang nantinya akan terus bergantung kepada negara lain, hal ini dikarenakan good governance identik dengan kaitan keunggulan, kompetitif di tingkat global dan semakin berkembangnya masyarakat sipil.

*Good governance* adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengambilan keputusan. Pelaksanaan proses ini, pada masa sekarang diperlukan transparansi, partisipasi, *stakeholders*, aturan main/penegakan hukum dalam pengambilan keputusan dan juga perlu *accountability* bagi mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, agar pengambil keputusan bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya. *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

*Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Konsep *good governance* juga dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. *Human interest* adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Dalam konsep ini negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

### **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif yang memberikan gambaran pemecahan masalah berdasarkan analisis dan interpretasi penulis yang berasal dari observasi dan eksplorasi yang dilakukan dan literatur-literatur yang penulis dapatkan.

Menurut Whitney (dalam Yusuf, 2014), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, serta prosedur yang diterapkan dalam masyarakat dan beberapa situasi, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pendapat, proses yang sedang berlangsung, dan efek dari fenomena tersebut. Ketika sebuah fenomena dijelaskan dengan tepat, pertanyaan tentang hubungan, perbedaan, dan perkembangan dapat diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### SID Sebagai Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Penciptaan masyarakat madani dimulai dari langkah yang cukup kompleks, yaitu dimulai dari para birokrat karena pergerakan kehidupan sosial sangat bergantung pada gerak tingkah laku para aparat pemerintahan. Individu yang keterkaitan pada masyarakat madani, tidak hanya merasakan suasana kebersamaan yang congenial, tetapi juga proteksi terhadap serba ketersaingan yang di pantulkan modern atau yang beranjak modern. Masyarakat madani dapat diharapkan untuk “menjinakan” unsur-unsur primordial yang “*subversive*” dalam pergaulan yang pluralistik. Terbentuknya “*civil society*” akan mendorong sosial (*social responsibility*) dan kesadaran kebangsaan (*nasional consciousness*), akhirnya muncul kesadaran hukum dan masyarakat atau memupuk tradisi dari *law abiding citizen*. Terciptalah kedamaian, kerukunan yang mengakar kuat di masyarakat majemuk dan kebinekaan tunggal ika dalam mempercepat terwujudnya suatu masyarakat adil makmur dan sejahtera.

Dalam tahap pengelolaan desa sendiri tentu memerlukan informasi yang akurat dan kredibel. Dalam tahap perencanaan, informasi berguna untuk mengenali masalah dan potensi desa yang dimiliki. Pengetahuan akan masalah dan potensi menjadi syarat mutlak bagi desa dalam menentukan prioritas program yang paling penting untuk ditangani dan direalisasikan. Dalam tahap implementasi informasi berperan dalam proses pengambilan keputusan dan koordinasi demi terciptanya *output* yang lebih baik penyelenggaraan

desa itu sendiri. Sedangkan, dalam tahap pemantauan dan evaluasi informasi berguna untuk memastikan program berjalan sesuai dengan rencana namun tetap menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di lapangan sehingga informasi tersebut dapat berguna sewaktu-waktu dalam penyesuaian terhadap program yang sedang dijalankan.

Terkait dengan implementasi *good governance* saat ini sangat kental dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) yang menjadi sarana informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan informasi di tingkat desa, selain itu SID diharapkan menjadi bentuk nyata dari *good governance* dalam bentuk digitalisasi pemerintahan di tingkat pemerintah desa. Penerapan pemerintahan berbasis digital ini tidak luput kepada pemerintah desa Mulyasari yang terletak di dusun Cibubuhan Desa Mulyasari kecamatan Jatinagara, Ciamis.

### Implementasi SID di Pemerintah Desa Mulyasari

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Desa Mulyasari belum memiliki Sistem Informasi Desa walaupun perangkat desa terkait mengetahui dibutuhkannya SID tersebut. Menilik lebih dalam, ada banyak kendala yang dihadapi contohnya seperti jarak dan kesibukan dari perangkat desa yang menjadi hambatan dari proses pembuatan desa yang diharuskan dikoordinasikan dengan pihak Diskominfo Ciamis. Penulis datang membantu proses pembuatan SID tersebut, dengan berkoordinasi secara intens terkait dengan berkas-berkas yang harus diajukan beserta lampirannya. Dengan adanya aktifitas yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa, penulis turut membantu dengan berkoordinasi langsung dengan pihak Diskominfo Ciamis. Namun sangat disayangkan, dengan waktu yang ditetapkan, penyelesaian akan proses pembuatan SID ini urung terjadi, karena banyaknya kendala seperti lambatnya konfirmasi terkait pembuatan SID ini menjadi suatu permasalahan tersendiri. Selain hal itu, berkas yang dikumpulkan juga menjadi halangan karena kurang rincinya informasi yang didapat sehingga dalam proses pembuatan berkas yang diajukan masih terjadi kekurangan.

*Website* yang diajukan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, walau begitu pengalaman yang didapat akan menjadi sebuah acuan dalam kehidupan bersosial nantinya terutama nanti saat akan terjun ke masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan observasi dan penelitian di lapangan tentang analisis implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemerintahan yang berbasis digital menjadi suatu hal yang sangat penting di era modernisasi saat ini, termasuk di tingkat pemerintah desa di berbagai daerah, dengan adanya Sistem Informasi Desa, menjadi salah satu wadah yang penting bagi aktifnya pemerintah desa dalam menjalankan program-program yang ada, namun tidak semua desa memiliki Sistem Informasi Desa yang memadai termasuk desa Mulyasari yang terletak di dusun Cibubuhan Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara, Ciamis. Bahkan setelah ditelusuri lebih lanjut, Desa Mulyasari tidak memiliki SID sehingga penulis membantu dalam proses pembuatan SID namun tidak rampung karena waktu yang diberikan cukup terbatas.
- 2) Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) merupakan suatu bentuk terobosan dalam inovasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai upaya adaptasi yang dilakukan pemerintah desa dalam menjaga perannya dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Keberadaan SID sangat penting dalam menunjang dan menyediakan arus informasi yang kredibel dan akuntabel.
- 3) Terdapat banyak hambatan yang dihadapi dalam upaya implementasi SID tersebut, beberapa diantaranya yaitu kurangnya informasi yang di dapat oleh pihak desa terkait

proses implementasi SID, lalu belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki desa sebagai penunjang implementasi SID, kemudian kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pemerintah desa sebagai pengelola SID. Hambatan-hambatan tersebut dirasa perlu menjadi catatan untuk kedepannya sebagai acuan dalam proses implementasi SID di suatu pemerintahan desa, agar implementasi tersebut dapat menghasilkan *output* yang lebih baik dan optimal, baik bagi pemerintah desa sendiri sebagai yang mengelola dan memberdayakan SID tersebut maupun bagi masyarakatnya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityawarman. (2020). *Pembangunan Politik dan Kualitas Demokrasi*. Jurnal MODERAT. 6(2), 397-409.
- Josep. (2018). *Perbandingan Tata Pemerintahan Antara Good Governance dan Sound Governance*. Jakarta. Indocamp.
- Kurniawan, R.C. (2016). *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*. Fiat Justisia Journal of Law, 10(3), 569-585.
- Nasir, A. dkk. (2013) *Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif*. Yogyakarta.
- Sakir, Rahmatullah, A.S, Sarofah, R. (2019). *Optimalisasi Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Dusun Temanggung, Jetis, Saptosari, Gunungkidul, Yogyakarta*. WARTA LPM. 22(1), 1-5.
- Suprihatini, A. (2018). *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Tomo. (2019). *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*. Jakarta. Indocamp.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Edisi Pertama)*. Kencana.